

Praksis Pendidikan Menurut Habermas (Rekonstruksi Teori Evolusi Sosial Melalui Proses Belajar Masyarakat)

I Ketut Wisarja, I Ketut Sudarsana*

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Jl. Ratna No.51, Tonja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali
80237, Indonesia

Abstrak

Habermas yang bernama lengkap Jurgen Habermas seorang filosof Jerman dari mazhab kritis. Ia mengkritik habis epistemologi pendahulunya yakni; Karl Marx terhadap pengandaian-pengandaian dan material historis sebagai cacat fundamental, yang mengkaitkan secara linier kemajuan rasionalitas manusia dengan perkembangan alat-alat produksi. Habermas mengatakan ini dapat terjadi karena materialisme historis mengesampingkan segi-segi komunikatif yang mendasari formasi sosial baru disetiap tahap perkembangan masyarakat. Proses belajar masyarakat secara evolusioner tergantung pada kompetensi individu-individu yang menjadi anggotanya. Kompetensi itu tidak dikembangkan secara individual dan terisolasi, tetapi dengan interaksi sosial melalui perantara struktur-struktur simbolis yang berasal dari dunia kehidupan mereka. Perkembangan kompetensi ini terjadi dalam tiga tahap komunikasi yang oleh Habermas disebut "Sketsa tiga tahap perkembangan kompetensi komunikatif". Pengendalian teknis terhadap proses-proses yang objektif atau yang diobjektifkan telah menggantikan emansipasi manusia. Kolonisasi paradigma sistem terhadap paradigma dunia-kehidupan telah mengarahkan kesadaran hidup bersama pada perilaku yang manipulatif. Konsekuensi logisnya, wacana pendidikan cenderung mengarahkan dirinya ke dalam logika sistem-industri yang tengah terselenggara, dengan demikian pendidikan niscaya mempertautkan dirinya dengan gerak modernisasi.

Kata Kunci: praksis pendidikan, rekonstruksi teori evolusi sosial, dan proses belajar masyarakat.

Abstract

[*Education Praxis according to Habermas (Reconstruction of Social Evolution Theory Through Community Learning Process).*] Habermas whose full name is Jurgen Habermas a German philosopher from a critical school. He criticized the epistemology of his predecessors, namely; Karl Marx against historical assumptions and materials as fundamental flaws, which linearly associate the progress of human rationality with the development of the means of production. Habermas says this can happen because historical materialism ignores the communicative aspects underlying new social formations at every stage of community development. The evolutionary process of community learning depends on the competence of the individuals who are members. The competence is not developed individually and isolated, but by social interaction through the intermediaries of the symbolic structures derived from their living world. This development of competence occurs in three stages of communication which Habermas calls the "Sketch of the three stages of the development of communicative competence". The technical control of objective or objectified processes has replaced human emancipation. The colonization of the system paradigm against the life-world paradigm has directed awareness of coexistence on manipulative behavior. The logical consequence, the educational discourse tends to direct itself into the logic of the established industry-system, so education necessarily links itself to the motion of modernization.

Keywords: education practices, reconstruction of social evolution theory, and community learning process.

1. Pendahuluan

Sejak digulirkannya gerakan reformasi di Indonesia, tentu membawa akibat yang berpengaruh

pada seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Apa yang semula dianggap mapan (*established*) oleh kebanyakan orang, saat ini tidak menutup kemungkinan untuk dipertanyakan kembali, diubah, atau bahkan diganti sama sekali. Fakta yang dapat

*Penulis korespondensi
email: ulakan82@gmail.com

ditunjuk untuk penjelasan ini misalnya, pada masa orde baru, budaya oposisi dianggap sebagai hal yang tabu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berhembusnya angin reformasi membawa pada suatu perubahan bahwa budaya oposisi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang perlu untuk dihindari, bahkan justru saat ini dianggap sebagai suatu kebutuhan. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan akhir-akhir ini, dengan makin marak munculnya partai-partai baru sebagai salah satu indikator bagi mulai diterimanya budaya oposisi oleh masyarakat Indonesia.

Implikasi lebih lanjut dari mulai terbukanya kran budaya oposisi ini berpengaruh pula terhadap pemahaman tentang konsep masyarakat ideal. Selama ini konsep masyarakat yang menonjolkan keselarasan dan keserasian merupakan model masyarakat yang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dianggap sebagai bentuk yang ideal. Kehidupan masyarakat yang baik adalah kehidupan yang diwarnai oleh suasana rukun, menghindari adanya pertentangan. Sekilas hal ini nampak wajar-wajar saja dan masuk akal. Kenyataannya, secara umum manusia memang tidak pernah menginginkan timbulnya konflik dalam interaksi dengan lingkungannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap rukun merupakan hal yang penting bagi kehidupan bersama, sebab dengan kerukunan itu memungkinkan masyarakat untuk secara bersama-sama mengatasi masalah yang dihadapi. Namun, kecenderungan untuk menekankan pada aspek keselarasan yang berlebihan juga membuka peluang bagi timbulnya masalah baru, yakni matinya kreativitas dan terhambatnya kemajuan (Suseno, 1992). Interaksi sosial merupakan kata kunci yang perlu diperhatikan. Soekanto memandang bahwa interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Sedangkan interaksi sosial sendiri sebagai suatu proses, tidak selamanya harmonis. Terkadang yang terjadi adalah suatu proses disosiatif dan konflik. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, baik menyangkut perorangan maupun kelompok. Bentuknya dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan juga pertentangan (*conflict*). Hal ini kemudian mendorong tumbuhnya pemikiran-pemikiran yang bertumpu pada realitas sosial yang selalu berkembang. Proses perkembangan masyarakat itu sendiri dalam beberapa teori antara lain dapat berlangsung melalui evolusi maupun revolusi (Soekanto, 1982).

Mencermati dinamika perkembangan masyarakat, salah seorang filsuf yang mempunyai perhatian yang sedemikian besar dalam hal ini adalah Habermas. Habermas melihat bahwa perkembangan masyarakat berlangsung secara evolutif. Konsep evolusi sosial filsuf neo-marxis Jerman ini mengungkapkan bahwa evolusi sosial berlangsung melalui proses-belajar masyarakat (*sosial learning-process*) yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Proses-belajar masyarakat (*sosial learning-process*) terjadi dalam dua dimensi; pertama dalam dimensi kognitif-teknis dan yang kedua dalam dimensi moral-praktis. Kedua dimensi tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang, tidak dapat direduksi satu

sama lain (Hardiman, 1990). Proses-belajar masyarakat itu hanya dapat dimungkinkan berjalan bila prasyarat-prasyarat yang diperlukan dapat terpenuhi. Prasyarat tersebut adalah tersedianya kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan manusia untuk berbincang secara komunikatif. Kondisi tersebut menurut Habermas, mengacu pada terciptanya suatu suasana berbincang yang membuka peluang bagi masing-masing individu yang terlibat di dalamnya untuk mengajukan pendapat, kepentingan dan kekhawatirannya tanpa merasa tertekan. Hubungan yang terjadi disini adalah hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kedudukan sama dan bukan hubungan kekuasaan. Hal ini dapat terjadi apabila masing-masing pihak saling mengakui kebebasan lawan dialognya dan saling percaya.

Kondisi seperti yang telah digambarkan Habermas tersebut dalam masyarakat Indonesia agaknya belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan baik. Adanya represi terhadap kebebasan berpendapat merupakan fenomena yang sering tergelar dihadapan mata. Hal ini semakin diperkuat oleh kultur paternalistik yang melekat dalam ciri masyarakat Indonesia, sehingga hubungan sosial yang terjadi lebih didominasi oleh hubungan yang bersifat vertikal daripada hubungan yang bersifat horisontal. Pola komunikasinya cenderung dari atas ke bawah (*top-down*). Kultur paternalistik yang demikian ini mengarah pada suatu kondisi bahwa segala sesuatu yang menyangkut inisiatif, teladan dan kewenangan harus dimulai dari pemimpin (Panuju, 1987). Tidak mengherankan jika dalam suatu forum, budaya kritik atau interupsi masih dianggap sebagai tindakan tidak etis. Sebenarnya jika dikatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak mempunyai kultur berbincang dialogis, itu tidak sepenuhnya benar. Masyarakat Indonesia, sesungguhnya telah akrab dengan konsep "musyawarah-mufakat" yang merupakan wahana untuk mengambil keputusan berdasar kata sepakat. Konsep tersebut dalam praktiknya seringkali hanya berhenti menjadi kata-kata mutiara yang indah daripada terealisasi dalam kenyataan.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa transformasi sosial, menurut Habermas, berlangsung melalui proses-belajar masyarakat (*sosial learning-process*) yang mensyaratkan adanya kemungkinan bagi individu-individu untuk dapat berbincang secara komunikatif. Melalui proses-belajar tersebut, struktur-struktur rasionalitas yang terlembaga akan dapat tercapai. Struktur-struktur rasionalitas yang terlembaga ini pada gilirannya akan menjadi kerangka acuan yang memungkinkan proses-proses belajar di tingkat yang lebih tinggi (Sudarsana, 2016). Hasil-hasil proses-belajar yang dilakukan oleh masyarakat tersebut akan menjadi kognitif dan normatif yang dapat diaktualisasikan pada saat masyarakat menghadapi masalah-masalah yang tidak lagi dapat dipecahkan dalam kerangka integrasi sosial yang ada (Suseno, 1990). Dengan demikian masyarakat dapat melangsungkan perkembangannya menuju kemajuan secara evolusioner.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana lebih menekankan pada proses dan makna yang akan dikaji secara utuh, statis dan kongkrit yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Pada kondisi yang alamiah dari munculnya berbagai perubahan paradigma dalam fakta kehidupan sosial, realita atau fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan, realita tetap, konkrit, teramati, terukur, dan dilakukan hubungan gejala yang bersifat sebab akibat. Dalam paradigma perubahan tersebut dipandang sebagai suatu yang naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna yang sering disebut paradigma positivisme yang mengembangkan jenis penelitian kualitatif.

Instrumen yang dipergunakan adalah berbagai alat bantu pengumpulan data seperti pedoman wawancara, pedoman *observasi*, alat-alat perekam dan sebagainya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah seperti: 1) reduksi data, 2) klasifikasi data, 3) interpretasi data, 4) penarikan kesimpulan.

3. Temuan dan Pembahasan

a. Rekonstruksi Teori Evolusi Sosial

Habermas dalam berbagai kesempatan sering menyatakan bahwa tujuan pergulatan ilmiah yang dilakukannya adalah untuk merekonstruksi materialisme historis. Salah satunya diungkapkan dalam karyanya yang berjudul "*Communicacion*

ini menurut Habermas harus ditangkap dalam dua perspektif filosofis yang terpilah, yakni teori krtirik rasionalitas (Kantian) dan teori *and the Evolution of Society*". Tujuan yang ingin dicapainya adalah "*to develop a theoretical program that I understand as a reconstruction of historical materialism*" (Habermas, 1979, hal. 95). Titik tolak yang digunakan Karl Marx – misalnya, *species-being* – juga digunakan Habermas. Hanya saja Habermas sangat tidak setuju dengan cara Marx memandang unsur-unsur *species-being*. Marx gagal dalam memilahkan dua komponen *species-being* yang terpisah secara analitis, yaitu kerja (tindakan rasional-bertujuan) dan interaksi sosial (interaksi simbolik, tindakan-komunikatif). Habermas melihat bahwa Marx cenderung untuk mengabaikan yang terakhir ini dan mereduksikannya pada kerja. Karena itu, rekonstruksi Habermas dimulai dengan bertitik tolak pada dua pemilahan tersebut, yang secara jelas dipaparkannya dalam *Toward a Rational Society*: "*I take as my startingpoint the fundamental distinction between work and interaction*" (Habermas, 1970, hal. 91). Pemilahan antara kerja dan interaksi ini dalam karya-karya Habermas sering kali diistilahkan dengan pemilahan antara tindakan rasional-bertujuan dan tindakan-komunikatif.

Kritik yang sangat radikal dilontarkan Habermas terhadap pengandaian-pengandaian dasar materialisme historis. Cacat fundamental yang melekat dalam teori Marx terutama dilihat Habermas pada

usaha Marx untuk mengaitkan secara linier kemajuan rasionalitas manusia dengan perkembangan alat-alat produksi. Perkembangan alat-alat produksi dipandang dapat memacu perkembangan dalam interaksi sosial di bidang produksi maupun dalam perwujudan kerangka institusional dan sistem-sistem simbolik penyediaan makna (Suseno, 1992). Sungguhpun demikian, konsep materialisme historis tentang rangkaian perkembangan cara-cara produksi, setidaknya dapat mempermudah penjelasan evolusi sosial. Konsep ini dapat menata perkembangan sejarah dalam suatu logika perkembangan, tetapi tidak cukup memadai kesemestaan dimensi manusia. Habermas menganggap ini terjadi karena materialisme historis mengesampingkan segi-segi komunikatif yang mendasari formasi sosial baru di setiap tahap perkembangan masyarakat.

b. Makna Filosofis yang Terkandung pada Proses Belajar Masyarakat (*Social Learning-Process*) dalam Kerangka Evolusi Sosial

Penjelasan evolusi sosial dimulai Habermas dengan mengajukan tesis bahwa evolusi sosial berlangsung melalui proses-belajar masyarakat (*social learning-process*). Proses belajar tersebut berlangsung dalam dua dimensi yakni, dimensi kognitif-teknis (derivasi dari kerja) dan dimensi moral-komunikatif (derivasi dari interaksi atau komunikasi). Habermas dalam hipotesisnya berpendapat bahwa faktor utama pendorong berlangsungnya evolusi sosial terletak pada proses-belajar atau rasionalisasi. Di sini, Habermas menghubungkan antara rasionalisasi masyarakat dengan proses belajar "*Societal rationalization is a learning process*" (Braaten, 1991). Rasionalisasi masyarakat evolusi sosial (Hegelian, Marxian, Weberian).

Karl Marx sebenarnya juga memahami bahwa evolusi sosial berlangsung melalui proses-belajar sosial. Hanya saja mekanisme belajar versi Marx semata-mata pada kategori tindakan rasional-bertujuan (kerja) yang terikat dalam produksi. Ini berarti bahwa kategori lain yang juga sama pentingnya terabaikan, yaitu kategori tindakan komunikatif (interaksi atau komunikasi). Karena itu, konsep evolusi sosial agar dapat mewartakan kesemestaan manusiawi haruslah didasarkan pada konsep praksis yang benar. Praksis tersebut meliputi kerja dan komunikasi, keduanya tidak dapat direduksikan satu sama lain. Berdasar pada konsep praksis tersebut, proses belajar dengan demikian haruslah tidak hanya dalam dimensi pengetahuan teknis yang menentukan perkembangan kekuatan-kekuatan produksi. Proses belajar juga harus berlangsung dalam dimensi kesadaran praktis-moral yang menentukan struktur-struktur interaksi.

Proses belajar dalam dimensi praktis-moral oleh Habermas bahkan mendapat perhatian yang lebih besar. Habermas melihat bahwa yang mendorong terjadinya transformasi sosial sebenarnya terletak pada proses-belajar masyarakat dalam dimensi praktis-moral yang komunikatif ini. Perkembangan teknis tidak selalu menghasilkan tantangan evolusioner. Kemajuan teknis baru mengubah masyarakat setelah diapresiasi secara praktis oleh individu-individu dalam masyarakat

dengan membangun institusi-institusi baru yang sesuai. Habermas menjelaskan hal ini dengan membedakan antara potensi pengetahuan yang ada dan penerapan pengetahuan itu. Pertumbuhan pengetahuan dari dalam masyarakat menjadi potensi pengetahuan yang menentukan evolusi sosial hanya jika sebuah kerangka-kerja institusional baru muncul untuk memecahkan masalah-masalah sistem yang tidak dapat terselesaikan oleh kerangka-kerja institusional yang ada. Artinya, potensi pengetahuan diterapkan secara institusional sebagai pemecahan masalah melalui kerangka-kerja institusional ini (Hardiman, 1993). Pendapat Habermas ini tentu berseberangan dengan pandangan Marx yang meletakkan dialektika kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan produksi sebagai faktor penentu transformasi sosial. Kemajuan dibidang ekonomi dan teknologi menurut Habermas memang penting, tetapi tidak memegang peran kunci bagi berlangsungnya transformasi sosial. Transformasi sosial lebih menunjuk pada pembentukan kerangka-kerja institusional dan bentuk-bentuk integrasi sosial yang baru. Pendapat Habermas ini dibuktikan dengan menunjukkan fakta historis bahwa perkembangan alat-alat produksi tidak pernah mendahului, melainkan justru selalu menyusul pembentukan kerangka-kerja institusional dan bentuk-bentuk integrasi sosial yang baru (Suseno, 1992). Revolusi industri, misalnya, mulai berlangsung hampir seratus tahun setelah masyarakat borjuis terbentuk. Demikian pula dengan cita-cita liberalisme; cita-cita liberalisme tidak mengikuti perkembangan teknologi industri, tetapi ia justru mendesak perkembangan teknologi industri. Berdasarkan hal tersebut, peralihan suatu bentuk integrasi sosial menuju ke suatu bentuk integrasi sosial yang baru – misal dari sistem kekerabatan ke sistem negara – memerlukan pengetahuan yang bersifat praktis-moral. Proses semacam ini memerlukan pengetahuan praktis-moral dan bukannya pengetahuan teknis karena ia tidak berkaitan dengan perluasan kontrol teknis atas alam, melainkan dengan interaksi sosial.

Mekanisme proses-belajar masyarakat tersebut dikemukakan oleh Habermas dengan menekankan perhatian yang besar pada peran individu anggota masyarakat yang menjadi agen evolusi sosial (Habermas, 1979, hal. 160). Individu-individu ini pada awalnya secara kebetulan mempelajari berbagai kompetensi dan keterampilan baru. Hasil proses belajar dalam bentuk berbagai kompetensi baru ini bila memasuki wilayah tradisi kultural dan pandangan-dunia masyarakat (*weltbilder*), akan menjadi potensi kognitif dan normatif masyarakat. Potensi ini pada suatu saat dapat diaktualkan apabila masyarakat menghadapi permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dengan kerangka integrasi sosial yang ada. Permasalahan yang timbul sebagai tantangan evolusioner masyarakat ini sifatnya kontingen, bergantung pada situasi yang ada. Kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan bila masyarakat tersebut mampu menghadapi tantangan evolusioner tersebut. Apabila masalah-masalah yang menjadi tantangan evolusioner ini timbul, dan kebetulan tradisi kultural masyarakat memuat struktur-struktur rasional

potensial yang membantu mengatasinya, maka masyarakat itu akan mengalami perubahan kerangka institusional dan bentuk-bentuk integrasi sosial. Perubahan kerangka institusional dan bentuk integrasi sosial ini merupakan gerbang bagi terjadinya kemajuan evolusioner.

Kemajuan evolusioner yang dihasilkan dari proses-belajar masyarakat dapat diukur dengan berpatokan pada suatu konsep yang oleh Habermas disebut “prinsip organisasi masyarakat” (*organisationprinzip*). Prinsip organisasi ini merupakan penentu identitas dari suatu formasi sosial. Oleh Habermas prinsip organisasi sosial sendiri diartikan sebagai inovasi-inovasi yang menjadi mungkin melalui tahap-tahap proses belajar yang dapat disusun menurut logika masyarakat (Habermas, 1979, hal. 153). Prinsip-prinsip organisasi itu menentukan dalam struktur-struktur mana perubahan-perubahan dalam sistem-sistem institusi itu mungkin. Sejauhmana kemampuan dan kekuatan-kekuatan produksi yang ada dipakai masyarakat dan sejauhmana perkembangan kekuatan-kekuatan produksi baru dapat dirangsang. Suatu prinsip organisasi terdiri dari aturan-aturan yang sangat abstrak, sehingga dalam formasi sosial yang ditentukannya sejumlah cara produksi yang secara fungsional sama menjadi mungkin. Dengan demikian, prinsip organisasi dipahami Habermas semacam cakrawala bagi proses belajar suatu masyarakat, baik dalam dimensi teknis maupun praktis. Apabila proses belajar berkembang sedemikian rupa sehingga melampaui cakrawala tersebut, maka prinsip organisasi itu akan terancam perubahan. Berubahnya prinsip-prinsip organisasi ini tidak lain adalah berubahnya formasi-formasi sosial, dan ini membuka kemungkinan bagi kemajuan evolusioner.

Suatu perubahan dapat dikatakan sebagai kemajuan evolusioner jika prinsip organisasi masyarakat itu memperbolehkan adanya dua hal. **Pertama**, adanya pembedaan antara persoalan-persoalan teoretis dan praktis; dan **Kedua**, adanya peralihan dari proses belajar non refleksif (pra-ilmiah) ke proses belajar refleksif (Habermas, 1975, hal. 15).

Proses belajar baik dalam dimensi kognitif-teoritis maupun moral-praktis sangat berkaitan dengan bentuk-bentuk diskursus dalam masyarakat untuk menghasilkan pengetahuan yang sah tentang realitas tertentu. Ini disebut Habermas dengan istilah “klaim-klaim kesahihan” (*validity claims*). Habermas mengungkapkan empat klaim kesahihan dalam “*The Theory of Communicative Action*” Volume I : klaim kebenaran, klaim ketepatan, klaim autentisitas, dan klaim komprehensibilitas. Klaim kebenaran (*truth*) berkaitan dengan kesepakatan terhadap dunia alamiah dan objektif. Klaim ketepatan (*rightness*) berkaitan dengan kesepakatan terhadap pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial. Klaim autentisitas atau kejujuran (*sincerity*) berkaitan dengan kesepakatan terhadap kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang. Klaim komprehensibilitas berkaitan dengan pencapaian kesepakatan atas ketiga klaim tersebut dan kemampuan untuk menjelaskannya.

Prinsip-prinsip organisasi ini berkaitan dengan tindakan-tindakan sosial, lebih khusus lagi kompetensi

tindakan. Habermas berpendapat bahwa proses-belajar masyarakat secara evolusioner tergantung pada kompetensi individu-individu yang menjadi anggotanya. Kompetensi itu tidak dikembangkan secara individual dan terisolasi, tetapi dengan interaksi sosial melalui perantara struktur-struktur simbolis yang berasal dari dunia kehidupan mereka (*lebenswelt*).

Perkembangan kompetensi ini terjadi dalam tiga tahap komunikasi yang oleh Habermas disebut dengan sketsa tiga tahap perkembangan kompetensi komunikatif (Habermas, 1979, hal. 154-215). Tahap pertama adalah interaksi yang dimediasi secara simbolik, tahap kedua adalah tuturan yang dideferensiasi melalui pernyataan-pernyataan, dan tahap ketiga adalah perbincangan argumentatif. Sketsa ini tidak dimaksudkan Habermas untuk menjelaskan aspek kognitif dari perkembangan komunikasi masyarakat, tetapi untuk menunjukkan pembelaan tahap demi tahap dari suatu realitas sosial yang timbul. Tahap pertama, berbagai motif dan harapan tingkah laku yang bertindak dipandang pada satu tataran kenyataan tunggal. Tahap kedua, tindakan dibedakan dari norma. Norma, perilaku, motif berada pada satu tataran yang berbeda dengan tataran tindakan. Tahap ketiga, prinsip-prinsip yang menghasilkan norma dan tindakan dibedakan dari norma itu sendiri. Prinsip, pelaku dan motif ditempatkan di balik sistem tindakan yang ada. Konsep ini oleh Habermas dipandang dari dua sisi; yaitu, sebagai konsep tentang kompetensi subjek tindakan dan tuturan yang tumbuh dalam suatu dunia simbolis, dan sebagai konsep infrastruktur dari sistem tindakan itu sendiri di sisi lain.

c. Implikasi Makna Filosofis Proses Belajar Masyarakat dalam Memetakan Wilayah Proses Belajar yang Mewakili Kesemestaan Dimensi Manusia (Pertautan Teori dan Praksis Pendidikan)

Epistemologi Habermasian mengajukan pembedaan kepentingan teknis (medium kerja), kepentingan praktis (medium komunikasi), dan kepentingan emansipatoris (medium kekuasaan). Hubungan antara kepentingan dengan pengetahuan tersebut adalah bahwa kepentingan teknis telah menghasilkan ilmu-ilmu empiris-analitis dan mengarahkan ilmu-ilmu tersebut sebagai kekuatan-kekuatan produktif. Kekuatan produksi adalah ekspresi dan perluasan kerja manusia yang berorientasi pada dan berusaha untuk melakukan kontrol teknis atas alam dan manusia. Kekuatan kepentingan teknis ini tampil sebagai paradigma sistem di dalam modernisme. Kepentingan praktis menghasilkan ilmu-ilmu historis-hermeneutis yang memajukan interaksi sosial dan memperluas inter-subjektivitas. Kepentingan ini menyajikan diri sebagai kekuatan-kekuatan komunikatif di dalam paradigma dunia-kehidupan. Kekuatan komunikasi merupakan negasi tetap terhadap kekuatan produksi. Sedangkan kepentingan yang ketiga, yaitu emansipatoris, jarang dieksplisitkan dalam riset-riset Habermas yang belakangan.

Eksplorasi Habermas terhadap kepentingan-kepentingan pengetahuan modern merupakan salah satu epistemologi yang paling canggih yang sejauh ini berhasil dikembangkan. Menurut epistemologi ini,

fokus permasalahan rasionalitas ilmu-ilmu modern bukanlah terletak pada kepentingan transendentalnya melainkan terdapat di dalam kekuasaan metodologi ilmu-ilmu empiris-analitis dalam kuasa pengetahuan modern.

Kepentingan-kepentingan rasio tersebut adalah kekuatan yang mengarahkan pengetahuan sehingga juga disebut kepentingan kognitif atau kepentingan konstitutif-pengetahuan. Kepentingan rasio (*interesse*) ini menjadi perantara pengetahuan dengan kehidupan, aspek transendental dengan empiris, dan selalu mengacu pada praksis. Habermas tidak menolak peranan positif ilmu-ilmu empiris-analitis yang mendasari teknologi untuk industri sepanjang tidak mendominasi medium komunikasi. Untuk itu, sebagai perimbangan praksis, Habermas mengeksplorasi kepentingan praktis ilmu-ilmu historis-hermeneutis sebagai paradigma komunikasi yang tetap menawarkan emansipasi dan pencerahan.

Dengan memahami praksis sebagai konsep sentral dalam filsafat kritis, yaitu kerja (*arbeit*) dan komunikasi (*communication*), maka praksis dilandasi kesadaran rasional. Jadi rasio tidak hanya tampak dalam ilmu-ilmu empiris-analitis, melainkan juga terdapat di dalam ilmu-ilmu historis-hermeneutis yang mengarahkan interaksi intersubjektivitas dengan bahasa sehari-hari. Seperti halnya ilmu-ilmu empiris-analitis membuat orang berdistansi dengan alam, ilmu-ilmu historis-hermeneutis yang tampil sebagai permasalahan bahasa juga memungkinkan distansi dari persepsi langsung, sehingga kepentingan-kepentingan yang mendasarinya berhubungan dengan praksis dan rasionalitas.

Dalam riset-risetnya, Habermas mengandaikan bahwa konsensus dapat dicapai dalam masyarakat reflektif yang berhasil menyelenggarakan komunikasi yang memuaskan. Di dalam komunikasi tersebut, para partisipan ingin membuat lawan bicaranya memahami maksudnya dengan berusaha mencapai klaim-klaim kesahihan (*validity claims*). Klaim-klaim ini dipandang rasional dan akan diterima tanpa paksaan sebagai hasil konsensus (Hardiman, 1993).

Beranjak dari praksis modernisme Habermasian yang menawarkan paradigma komunikasi, berikut ini akan dieksplorasi praksis pendidikan. Neologisme praksis pendidikan merupakan perimbangan kepentingan-kepentingan rasionalitas ilmu di dalam wilayah-wilayah pendidikan.

Di dalam konteks pembangunan ilmu dan teknologi yang mendasarkan diri pada paradigma sistem, adalah fakta bahwa pendidikan secara inhern adalah investasi, sama halnya dengan bentuk investasi lain pada modal fisik (Boediono, 1994). Pendidikan menanamkan kapasitas baru untuk belajar serta ketrampilan modal manusia produktif. Pendidikan terutama untuk menanamkan dan memungkinkan penggunaan pengetahuan teknik produksi dan organisasi produksi, serta menyebarkan kemajuan teknis yang merupakan kekuatan utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan teorisasi "*human capital*" inilah :

"Akuisisi dan aplikasi pengetahuan ini ditentukan sebagian besar oleh situasi apakah

penduduk telah memiliki sifat dan motivasi yang berkaitan dengan pendidikan formal, berasumsi bahwa sekolah mencakup subyek yang bersifat rasional sekuler yang memerankan pengembangan kemampuan membaca, menulis, matematika, bahasa, analisis, dan pemecahan masalah” (Boediono, 1994).

Pendidikan memungkinkan terselenggaranya perubahan struktur agar industrialisasi dapat terwujud secara efisien. Wacana pendidikan saat ini mengajukan isu-isu mengenai peranan pendidikan di dalam konteks transformasi industrial, terutama hubungan antara teori dengan praksis. Hukum-hukum reproduksi diri manusia dan masyarakat Indonesia dalam era industri modern akan menghadirkan ancaman, yaitu pendasaran hubungan teori dengan praksis tidak lebih dari aplikasi rasionalitas-tujuan yang berdasarkan paradigma sistem. Hukum-hukum reproduksi ini akan mendasarkan kekuatannya pada skala perluasan pengendalian teknis atas alam, peningkatan administrasi manusia, dan pola-pola hubungan melalui organisasi sosial.

Pengendalian teknis terhadap proses-proses yang objektif atau yang diobjektifkan telah menggantikan emansipasi manusia. Kolonialisasi paradigma sistem terhadap paradigma dunia-kehidupan telah mengarahkan kesadaran hidup bersama pada perilaku yang manipulatif. Konsekuensinya, wacana pendidikan cenderung mengarahkan dirinya kedalam logika sistem industri yang tengah terselenggara. Pendidikan niscaya mempertautkan dirinya dengan gerak modernisasi.

Saling pengaruh antara ilmu dan teknologi pada produksi industri yang cenderung menimbulkan distorsi yang patologis menyebabkan perkembangan ilmu-ilmu modern tidak selalu bersesuaian, bahkan bertentangan dengan harapan modernisme. Modernisme yang terselenggara menyajikan kenyataan pembangunan dengan rasionalitas-tujuan yang paradoks. Dalam konteks positivisme yang telah meninggalkan pertanyaan-pertanyaan epistemologi, ilmu-ilmu modern menyatakan dirinya untuk menjadi tujuan di dalam dirinya sendiri. Kepentingan rasionalitas ilmu-ilmu modern merupakan alat untuk menguasai proses produksi dan reproduksi legitimasi sistem simbolis kenyataan modernitas.

Untuk menyelenggarakan perimbangan praksis pendidikan niscaya dieksplorasi paradigma komunikasi sebagai pendasaran terhadap praksis pendidikan itu sendiri. Atau, bagaimana melacak pendasaran paradigma komunikasi di dalam wilayah-wilayah pendidikan (*domains of learning*). Dengan titik tolak ini, tujuan pendidikan adalah menciptakan sarana-sarana yang akan mendorong kemampuan kreatif dan kritis di dalam kenyataan modernitas serta melacak cara-cara untuk berpartisipasi di dalam transformasi pembangunan.

Implikasinya adalah bagaimana menempatkan rasionalitas ilmu-ilmu modern di dalam sistem pendidikan yang sekaligus tetap menyajikan praksis pendidikan. Dengan memperhatikan ajuan (Nasikun, 1995), idealnya paradigma dunia-kehidupan atau komunikasi dapat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pemikiran antara mereka yang

pekerjaan dan perhatiannya sangat bersifat teknis dengan mereka yang minatnya ditujukan pada masalah-masalah kemanusiaan. Sebaliknya, paradigma sistem memiliki peranan kunci untuk merekayasa lingkungan material kehidupan manusia. Pada satu sisi, paradigma sistem memungkinkan (*enabling*) pengungkapan kualitas kehidupan yang sesuai dengan pilihan nilai-nilai yang dikehendaki. Sedangkan pada sisi lain mencegah (*constraining*) pengungkapan kualitas kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipilih.

Dalam eksplorasinya yang menempatkan wacana ilmu dan teknologi dalam hubungannya dengan masa depan pembangunan dan industrialisasi Indonesia, Nasikun mengajukan pengembangan ilmu dan teknologi yang berwawasan *Hi-Touch* daripada *Hi-Tech*, lebih berorientasi pada skala kecil dan berwajah manusia, serta yang lebih mencerahkan dan emansipatoris (Nasikun, 1995).

Implikasi epistemologi Habermas terhadap praksis pendidikan di Indonesia diletakkan dalam konteks kekuatan (*in term of*) modernisme yang tengah terselenggara. Eksplorasi ini harus mengacu pada konstruksi teori pendidikan Indonesia dengan kreterium Pancasila. Dialektika antara epistemologi Habermas dengan filsafat pendidikan Indonesia diharapkan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan wacana studi pendidikan Indonesia.

Dialektika bukan hanya diarahkan pada pendidikan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, tetapi juga sekaligus diorientasikan untuk pengembangan pendidikan yang mendasarkan pada paradigma komunikatif. Ilmu dan teknologi yang berorientasi pada pencapaian kerja, kesejahteraan, dan pendapatan, serta kekuasaan dan prestise, akan mengarah pada kemajuan materi. Dalam hal ini, menurut Kuntoro (1995) bekerja merupakan instrumen dasar pemenuhan kebutuhan manusia akan barang-barang konsumsi, harga diri, dan penghargaan sosial, yang dalam kepentingan nasional adalah untuk keunggulan komparatif dan kompetitif bangsa. Sedangkan negasinya adalah pendidikan yang berdasarkan paradigma komunikatif untuk librasi (pembebasan), yang menawarkan nilai-nilai transendental, untuk proses pemanusiaan yang mengacu pada Pancasila. Dialektika praksis pendidikan ini senantiasa diletakkan di dalam proses peningkatan kemampuan pembangunan.

Gerak kapitalisasi yang mau tidak mau berpengaruh terhadap dinamika pembangunan dan pendidikan di Indonesia menuntut pengkajian secara kritis dan proporsional. Dengan memperhatikan kapasitas bangsa untuk belajar, sebagai dasar pengembangan untuk kekuatan pendidikan nasional, eksplorasi terhadap epistemologi Habermas harus diarahkan untuk peningkatan kemampuan pembangunan. Tanpa mengabaikan bahwa epistemologi modernisme Habermas adalah pemikiran berlatar Barat, acuan Pancasila adalah kreterium untuk mempertahankan konteks dan kepentingan-kepentingan keIndonesiaan. Termasuk dalam hal ini adalah untuk mengeksplorasi implikasinya terhadap praksis pendidikan di Indonesia.

d. Implikasi Terhadap Praksis Pendidikan

Isu tentang peningkatan kemampuan pembangunan (*development capability*) merupakan salah satu permasalahan yang mendesak untuk dijawab. Kemampuan pembangunan, termasuk dalam hal pengetahuan pembangunan (*development knowledge*), yang telah ada niscaya ditingkatkan untuk dapat mengatasi permasalahan pembangunan. Dengan acuan inilah pendidikan dipahami secara antisipatoris, yaitu kegiatan untuk mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi. Antisipasi ini ditentukan oleh paradigma masyarakat termasuk masyarakat pendidikan terhadap kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi, terutama sebagaimana yang terangkat di dalam wacana ilmu dan teknologi, yang ditarik secara inferensial dari kenyataan modernitas.

Dengan mempertautkan rasio-komunikatif dengan wacana pembangunan ilmu dan teknologi, merupakan upaya untuk mengeksplorasi rasionalitas modernisme pada tahapan epistemologi. Dengan pendasaran ini akan diacak implikasinya terhadap praksis pendidikan di Indonesia, yaitu pada perimbangan rasionalitas ilmu di dalam wilayah-wilayah pendidikan. Secara hipotesis, perimbangan ini mengandaikan kekuatan modernisme dan pembangunan itu sendiri. Untuk itu akan diacu konsep “kapasitas bangsa untuk belajar” dan “kekuatan pendidikan nasional”.

Kapasitas bangsa untuk belajar (*national capacity for learning*) merupakan ke-mampuan bangsa untuk mencerna informasi-informasi baru yang dihasilkan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu. Penggunaan informasi ini merupakan salah satu acuan dan landasan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Konsep ini pernah diajukan Soedjatmoko (1983), yang oleh Mochtar Buchori dikembangkan sebagai kekuatan pendidikan nasional (*national education capability*), yaitu kemampuan bangsa untuk menyelesaikan secara relevan permasalahan pendidikan dewasa ini (Buchori, 1994). Dengan acuan inilah akan dieksplorasi paradigma komunikasi Habermasian sebagai pendasaran kapasitas bangsa untuk belajar dan implikasinya terhadap praksis pendidikan di Indonesia.

Adalah truisme, ilmu dikonsentrasikan pada teknologi, teknologi dikonsentrasikan pada industri, dan industri merupakan prasyarat yang mencukupi (*the necessary and sufficient conditions*) untuk pembangunan. Truisme tersebut ternyata merupakan harapan ideologis dengan anggapan dan kepentingan tertentu. Dengan perkataan lain, semakin tinggi penguasaan negara terhadap teknologi maka semakin maju dan makmur negara itu. Sehingga semua negara yang dikategorikan sebagai negara maju atau negara industri adalah negara yang memang sudah menguasai teknologi yang canggih. Juga, semakin tinggi kadar teknologi yang dimasukkan ke dalam produk-produk industri suatu negara maka semakin kuat pula negara itu dalam perdagangan internasional selama tingkat kecanggihan teknologi itu memang bisa dijual dengan harga yang bersaing (Kompas, 1988).

Posisi seperti itu yang kemudian menempatkan negara seperti Jerman dan Jepang sangat menonjol dalam perdagangan dunia, dan dengan alasan itu juga yang mendorong negara-negara lain mengarahkan sumber dayanya untuk mengejar posisi tersebut sebagaimana dapat kita lihat pada Korea Selatan, Hongkong, Singapura, Taiwan, dan sebagainya, yang lalu dikenal sebagai negara industri baru (NICs). Demikian lalu negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia, merasa harus berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan ekonomi, disamping untuk mengejar ketertinggalannya dengan pembangunan teknologi.

Kalau menyimak GBHN 1993, sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam susunan tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dengan masyarakat, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Tap MPR RI No.II/MPR/1993: 31). Untuk mencapai sasaran umum tersebut, perlu diantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi yang merupakan kekuatan-kekuatan pendorong terjadinya perubahan mendasar dalam berbagai kehidupan antar bangsa ke arah globalisasi. Kecenderungan globalisasi tidak saja meningkatkan saling pengaruh dan ketergantungan, tetapi juga persaingan dalam memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing bangsa dan negara.

Pengkajian secara kritis terhadap makna dan sasaran PJPT II dalam pembangunan nasional secara keseluruhan menunjukkan bahwa PJPT II memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada bidang ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Disamping itu juga prioritas untuk melaksanakan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Keberhasilan mengangkat harkat dan martabat manusia dan bangsa untuk menuju kemandirian juga sangat tergantung pada penguasaan ilmu dan teknologi. Demikian juga proses industrialisasi yang mempunyai daya saing serta keunggulan komparatif dan kompetitif hanya dapat diwujudkan melalui kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi.

Pembangunan ilmu dan teknologi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan dan strategi pembangunan secara menyeluruh, baik untuk kepentingan kesejahteraan maupun untuk keamanan. Kecenderungan dan perkembangan lingkungan strategis telah mengisyaratkan pentingnya peningkatan ilmu dan teknologi dalam strategi pembangunan nasional yang berpedoman pada prinsip yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan bangsa. Sebagai sarana kehidupan, terutama untuk masyarakat modern, penguasaan ilmu dan teknologi mensyaratkan kemampuan intelektual manusia, keterampilan fisik, dan keseimbangan antara kebijaksanaan dan kemampuan penalaran manusia. Meskipun ilmu dan

teknologi telah membawa kesejahteraan dan keamanan umat manusia, penggunaan dan penyalahgunaan ilmu dan teknologi dapat membatasi lapangan kerja, membahayakan lingkungan hidup, dan bahkan mengakibatkan patologi-patologi untuk pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, ilmu dan teknologi hendaknya dipandang sebagai suatu *instrumen* untuk memecahkan masalah sehingga tergantung manusia sendiri dalam penggunaannya.

Dalam perspektif epistemologi Habermasian, anggapan-anggapan di atas sesungguhnya berasal dari klaim validitas universal dari ilmu-ilmu empiris-analitis, yang telah berhasil menyajikan kenyataan modernitas, yang selanjutnya sangat membantu dalam menyebarkan ideologi masyarakat industri. Klaim validitas universal tersebut niscaya didukung oleh universalisasi kepentingan-kepentingan teknis. Hal ini tentunya dengan memberikan nilai tertinggi pada kerja manusia dan konsekuensinya, membenarkan ideologi industri yang berorientasi pada penguasaan serta kontrol teknis atas alam dan manusia. Perkembangan ilmiah, pertumbuhan kapitalisme, penetapan negara konstitusional, dan administrasi modern dikaji sebagai fenomena empiris dan diferensiasi struktural sistem-sistem sosial yang mempengaruhi pembangunan nasional.

Menurut Habermas (1990), rasionalitas yang mendasarinya adalah rasionalitas kerja, atau rasionalitas tujuan (*zweckrationalitat*) di dalam paradigma sistem. Teknik dan teknologi adalah pemanfaatan rasionalitas tujuan untuk melakukan, menguasai, dan mengendalikan kenyataan modernitas. Pada tahap lebih lanjut, rasionalitas-tujuan tampil sebagai teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan mengacu pada perhitungan teknis, tujuan yang direncanakan, dan sistem nilai yang ditetapkan. Pada rasionalitas ini sistem nilai bukanlah suatu sistem norma yang imperatif yang berhubungan dengan kebutuhan subjektif dan normatif. Sistem nilai dalam rasionalitas ini hanyalah data. Konsekuensinya, sistem nilai tidak lebih dari sistem peraturan yang memungkinkan untuk melakukan prediksi. Kreterium nilai bukan “benar dan tidaknya” atau “baik dan buruknya”, tetapi akibat dan konsekuensi dari suatu tindakan rasional.

Nilai dalam paradigma sistem hanya mempunyai makna informasi belaka. Dengan demikian pengambilan keputusan hanyalah kalkulasi biasa tentang saling pengaruh antara variabel-variabel teknik, tujuan, dan nilai (Kleden, 1987). Padahal hakikat keputusan niscaya disertai untuk kebebasan yang berdasarkan data yang ada (*on the basis of the data*) atau bertentangan dengan data (*in spite of the data*). Terdapat kecenderungan yang kuat pada rasionalitas-tujuan bahwa pengambilan keputusan hanyalah masalah teknis dan mengabaikan kepentingan praksis.

Dengan rasionalitas-tujuan, sistem nilai modernisme disederhanakan sebagai nilai dasar yang biologis, yaitu penyesuaian diri (*self-preservation*) dan *survival*. Rasionalitas-tujuan mengabaikan keragaman modernisme itu sendiri, apa lagi di dalam kritik-kritik pascamodernisme. Secara manajerial, pengaturan dan pengendalian akan tergantung pada jumlah dan jenis

informasi yang tersedia dan yang diterima. Oleh karena itu menjadi tergantung pada kemampuan belajar (*learning capacity*). Kemampuan atau kapasitas belajar dipahami sebagai suatu proses komunikasi yang tergantung pada arus informasi, kapasitas saluran informasi, dan efisiensi mekanisme-mekanisme kontrol.

Jika proses belajar berjalan baik, yaitu pada keadaannya yang optimal, sistem modernisme mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi serta meningkatkan kemampuan belajarnya secara terus menerus. Sebaliknya, jika mekanismenya terganggu maka kemampuan belajar sistem akan menurun. Misalnya karena informasi-informasi tertentu yang berasal dari lingkungan atau sistem itu sendiri. Keadaan optimal suatu sistem modernisme tergantung pada keseimbangan ideal antara stabilitas dan adaptasi. Sedangkan patologinya lebih disebabkan adanya penafsiran yang berlebihan (*over-valuasi*) antara stabilitas dan adaptasi, misalnya terlampau mengutamakan stabilitas sistem.

Dengan demikian, untuk mencapai ketahanan sistem maka sistem di dalam dirinya sendiri cenderung konservatif. Hal ini berpengaruh terhadap kapasitas belajar yang mengalami konservatisasi. Kekuatan sistem terletak pada prioritasnya terhadap pengeluaran (*out put*) dan bukannya pengambilan (*intake*). Sehingga gerak sistem modernisme dan ilmu-ilmu modern sebagai alat menuju tujuan lebih cenderung menghasilkan informasi daripada mendengarnya; lebih suka “berbicara” daripada “mendengar” (Kleden, 1987). Konsekuensinya, kekuatan dan sekaligus faktor krisis sistem modernisme ditentukan oleh kemampuannya untuk tidak belajar. Dengan demikian, sistem modernisme menyajikan dirinya secara paradoks. Bila kekuatan sistem terlalu kecil, sistem akan tidak berdaya terhadap lingkungan. Sebaliknya, jika kemampuan sistem terlalu besar maka kemampuan belajarnya akan berkurang atau malah makin menghilang.

Prinsip rasionalitas-tujuan adalah penyederhanaan, yaitu pembatasan dan formalisasi rasionalitas manusia untuk kepentingan suatu tujuan tertentu. Di dalam paradigma sistem, rasionalitas-tujuan mendapatkan sinerginya di dalam teori-teori kibernetika. Dalam hubungannya dengan tujuan, rasionalitas ini berfungsi untuk memperlancar proses-proses menuju tercapainya tujuan sistem dan tidak lagi memperlumahkan tujuan yang sudah ditetapkan (Suseno, 1990). Sedangkan caranya merujuk pada kriterium efektivitas, sebagaimana yang tampil secara radikal dalam kritik-kritik pascamodernisme terhadap modernisme.

Rasionalitas-tujuan mengarahkan masifnya perkembangan ilmu dan teknologi dalam gerak modernisasi. Dengan memahami rasio yang juga berdimensi komunikatif, Habermas tidak setuju jika rasionalitas-tujuan atau rasio kerja yang semata-mata menentukan gerak modernisasi. Modernisasi bukanlah sekedar kemajuan sistemik tekno-ekonomi, melainkan terlebih-lebih ditentukan oleh proses belajar dimensi praktis yang komunikatif.

Kemajuan tekno-ekonomi barulah merupakan kekuatan perubahan setelah diapresiasi secara praktis oleh para individu dengan membangun institusi-institusi baru yang sesuai. Masifnya modernisasi yang ekonomistis-teknologis justru mengandung bahaya disintegrasi sosial jika tidak diimbangi dengan sosialisasi kepentingan praktis yang komunikatif. Dengan perkataan lain, pembangunan ilmu dan teknologi, betapapun untuk keunggulan kompetitif bangsa, tidak mendominasi dunia-kehidupan (*Lebenswelt*) pem-bangunan itu sendiri. Kekuatan modernisme terletak pada perimbangan antara paradigma sistem dengan paradigma dunia kehidupan yang komunikatif. Implikasinya terhadap kapasitas bangsa untuk belajar adalah perimbangan antara proses belajar dimensi teknis yang niscaya menjadi kebijakan pembangunan ilmu dan teknologi dengan proses belajar dimensi praktis yang komunikatif. Atau dalam kosa kata Habermasian, pemberdayaan paradigma komunikasi adalah negasi tetap komunikatif.

4. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa; **Pertama**, proses-belajar masyarakat (*sosial learning process*) yang menjadi daya dorong evolusi sosial, berkaitan dengan kompetensi individu-individu masyarakat yang secara kreatif menyumbangkan berbagai potensi untuk menyelesaikan permasalahan kelangsungan hidup masyarakat. Potensi berupa berbagai kompetensi baik dalam bidang kognitif teknis maupun moral praktis. Proses belajar masyarakat yang demikian ini dalam kacamata filsafat sosial dapat ditarik pada keseimbangan antara asas subsidiaritas dan solidaritas. Individu sebagai anggota masyarakat tidak bisa demikian saja dipandang “terbenam” dalam kolektivitas. Kecenderungan untuk “menyeragamkan” individu-individu pada akhirnya akan tidak menguntungkan bagi kelangsungan suatu masyarakat.

Kedua, bahwa konteks pemikiran Habermas adalah Barat yang kapitalis-lanjut adalah bias yang harus dikaji secara dialektis, yaitu dengan mengeksplorasi paradigma komunikasi Habermasian di dalam konstruksi teori pembangunan di Indonesia dengan mengacu pada filsafat Pancasila. Sebagai eksplorasi awal mengenai implikasi epistemologi Habermas terhadap praksis pendidikan di Indonesia, studi ini mengharuskan acuan Pancasila. Pancasila merupakan kriterium, terutama dengan memperhatikan bahwa epistemologi Habermas merupakan pemikiran yang berlatar Barat. Dengan demikian, acuan Pancasila adalah untuk mempertahankan konteks dan kepentingan-kepentingan ke Indonesiaan dalam proses kapitalisasi global. Secara epistemologi, yakni bagaimana menderivatiskan paradigma komunikasi Habermas di dalam konstruksi teori pendidikan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Konsekuensi logisnya, bagaimana menyelenggarakan praksis pendidikan yang tetap menawarkan perimbangan antara kepentingan teknis dengan kepentingan praktis di dalam wilayah-wilayah pendidikan (*domains of learning*).

Ketiga, secara paradigmatis, epistemologi Habermas dapat berperan sebagai jembatan untuk menghubungkan paradigma sistem dengan paradigma dunia-kehidupan yang komunikatif. Di dalam wilayah-wilayah pendidikan, paradigma dunia-kehidupan menghubungkan paradigma sistem yang berorientasi teknis ke permasalahan kemanusiaan. Sedangkan paradigma sistem, yang berkemampuan untuk merekayasa lingkungan material kehidupan manusia, memungkinkan untuk mengungkap kualitas kehidupan yang sesuai dengan pilihan nilai ataupun justru mencegah nilai-nilai yang tidak dikehendaki.

Keempat, dalam proses peningkatan kemampuan pembangunan, nilai-nilai transendental Pancasila yang mencerahkan dan komunikatif di dalam praksis pendidikan merupakan keharusan untuk mengembangkan kekuatan pendidikan nasional dan kapasitas bangsa untuk belajar.

Daftar Pustaka

- Boediono. (1994). *Pendidikan, Perubahan Struktural dan Investasi di Indonesia*. Jakarta: Prisma.
- Braaten, J. (1991). *Habermas's critical theory of society*. New York: State University of New York Press.
- Buchori, M. (1994). *Pendidikan dalam pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Habermas, J. (1990). *Technik und Wissenschaft als Ideologie, diterjemahkan bahasa Indonesia oleh Hassan Basari: Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*. Jakarta: LP3ES.
- Hardiman, B. (1990). *Kritik ideologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, B. (1993). *Menuju masyarakat komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kleden, I. (1987). *Sikap ilmiah dan kritik kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Kompas. (1988). *Pilihan teknologi bukan demi teknologi itu sendiri*. Jakarta: Kompas.
- Kuntoro, S. (1995). Pengembangan Masyarakat Belajar dalam Kerangka Pembangunan. *Karya Ilmiah yang disampaikan didepan Rapat Senat FIP IKIP Yogyakarta* (hal. 6). Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Nasikun. (1995). Industrialisasi, Pengembangan Iptek, dan Orientasi Pendidikan Tinggi di Masa Depan. *Seminar Bulanan P3PK UGM* (hal. 18). Yogyakarta: UGM Press.
- Sudarsana, I. K. (2016). Pemikiran tokoh pendidikan dalam buku lifelong learning: policies, practices, and programs (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia). *Jurnal Penjaminan Mutu*, (2016), 44-53.
- Panuju, R. (1987). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedjatmoko. (1983). *Dimensi manusia dalam pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suseno, F. M. (1992a). *Berfilsafat dari konteks*. Jakarta: Gramedia.